

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, dengan kata lain pelaksanaan tugas pemerintah harus berdasar pada prinsip : efektif, efisien, akuntabel dan terbuka. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan aturan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang, yakni dijalankan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keikutsertaan masyarakat, keadilan, pemerataan, serta memperhatikan potensi suatu daerah.

Berangkat pada aturan tersebut, kini desa dianggap sebagai sektor penting dari pembangunan. Dimana rencana dan realisasi pembangunan harus bersumber pada aspirasi masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat desa yang menjadi objek dalam pembangunan dan pemberdayaan, dengan tujuan dapat memberi semangat bagi

masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, untuk menjadi desa yang unggul dan mandiri.

Hal tersebut didorong oleh keadaan bahwa sebagian masyarakat desa hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga dibutuhkan penanganan untuk merubah keadaan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kemiskinan yang berdampak pada berbagai masalah, diantaranya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut semakin parah karena pemerintah belum menemukan solusi untuk mengurangi ancaman kemiskinan. Oleh karena itu masyarakat tersebut perlu diberdayakan untuk lebih mandiri agar bisa merubah kehidupan mereka.

Bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang paling cepat dalam mencapai tujuan adalah dengan partisipasi masyarakat, atau dengan kata lain melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan untuk memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki di desa tersebut.

Salah satu program dari pemerintah untuk mendukung pembangunan desa yaitu dengan memberikan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN.

Dana Desa adalah bentuk nyata pengakuan negara terhadap hak desa dan kewenangan lokal.

Besaran Dana Desa yang dialokasikan per desa bervariasi sesuai dengan alokasi formula. Rumus alokasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan menghitung jumlah penduduk desa, luas desa dan tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Data jumlah desa, luas desa, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian atau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Tahun 2018 setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp. 933,9 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 960,6 juta. Sedangkan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 72 triliun untuk 75.961 desa di Indonesia. Sampai Juli 2021 sebesar Rp. 28,82 triliun atau 40,02 persen dana desa sudah digulirkan ke 69.661 desa. (Sumber: Kementerian Keuangan)

Dikarenakan nominal dana desa yang relatif besar dan begitu penting serta strategisnya dana desa, wajar jika mendapat perhatian lebih dari publik. Terlebih lagi banyak pihak yang khawatir terhadap kapabilitas perangkat desa dalam mengelola dana tersebut.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimaksudkan agar dana desa dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparat desa atau pihak lain.

Dalam merancang penelitian “Analisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora” penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya. Dengan penelitian terdahulu diharapkan penulis dapat melihat persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian, selain itu dalam penelitian ini diharapkan bisa diperlihatkan tentang kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Nunik Riyani (2016) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Singopuran Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dana desa dan evaluasi dari penggunaan dana desa di Desa Singopuran tahun 2016. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan poin yaitu, Dana desa digunakan untuk pembangunan masyarakat seperti perbaikan jalan, pembuatan talut, pembelian ATK, program PKK. Sedangkan kendala yang menghambat dalam penggunaan dana desa di Desa Singopuran adalah perangkat desa yang belum maksimal dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Nunik Riyani, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kristina Korniti (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru kota Kabupaten Kutai Timur” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa. penelitian yang dilakukan

menghasilkan poin yaitu, pengalokasian dana desa telah terlaksana dan digunakan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pengelolaan dana desa kurang optimal karena dipengaruhi oleh sumber daya masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengambil judul “ **Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora pada tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran serta informasi kepada pemerintah tentang pemanfaatan dana desa.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi rekan mahasiswa yang akan meneliti mengenai pemanfaatan dana desa.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Desa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haw Widjaja (2003:3) desa merupakan satu kesatuan dari masyarakat yang mempunyai susunan asli karena hak asal usul yang istimewa.

Seiring berjalannya ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berikut adalah pengertian Desa menurut para ahli

- a. Menurut R. Bintarto desa adalah kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dan adanya hubungan timbal balik dengan daerah lain
- b. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan adat dan menetap dalam suatu wilayah tertentu memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, karena keturunan ataupun karena memiliki kepentingan bersama.

1.5.2 Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih gambarkan sebagai daerah yang berada diwilayah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan

kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Karakteristik wilayah pedesaan lebih bersifat alami, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa.

Karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekanto antara lain Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali diminta saran atau petuah, Pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang cukup kuat. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan. Interaksi dengan wilayah

kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa menyadari bahwa interaksi dengan perkotaan itu sangat penting.

1.5.3 Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

- a. Pembangunan di desa relatif lambat.
- b. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, Namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada.

Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.

- c. Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.
- d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan kekeluargaan.
- e. Perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan, dan juga lainnya.
- f. Di pedesaan, adat dan tradisi masih berbentuk dan berkembang secara turun-temurun.

1.5.4 Kewenangan Desa

Untuk mendukung kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi: Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten atau kota. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari: Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Kewilayahan.

1.6 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan maupun kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kata proses menunjukkan pada tindakan atau langkah yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan langkah untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata

yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah menuju kondisi memiliki kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2013).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2013).

Menurut Huraerah 2008, pemberdayaan masyarakat merupakan proses usaha memperkuat yang disebut kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, menemukan solusi, serta memperhatikan kemampuan yang dimiliki. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan

masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya.

1.6.1 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. selanjutnya perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah

proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004).

Berikut adalah tahapan proses pemberdayaan Masyarakat :

1. Proses perencanaan

Perencanaan adalah tahapan awal dari suatu kegiatan yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting, dikarenakan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan bergantung dari perencanaan yang dilakukan. Perencanaan harus dilakukan secara matang agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik (Sudarto:2014).

Tahapan awal dari proses pemberdayaan yaitu melakukan rembuk dengan warga untuk menentukan program yang akan dijalankan. Pada tahapan ini pemerintah desa melakukan rembuk dengan warga di tingkat RT/RW guna membahas permasalahan yang ada di skala RT/RW tersebut. Kemudian masalah di skala RT/RW tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW untuk dibawa ke musrengbangdes.

2. Proses pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan langkah untuk mengtur kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan (Harini : 2013). Pengorganisasian penting agar pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan, selain itu agar tujuan yang dicapai bisa lebih

efektif dan efisien. Pengorganisasian tersebut membutuhkan kordinasi yang sinergis antar setiap partisipan didalamnya.

3. Proses pengarahan

Pengarahan merupakan upaya untuk menggerakkan elemen yang terlibat demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien (Harini : 2013). Pengarahan tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan, yaitu pemimpin mengarahkan bawahannya untuk melakukan apa yang di maksudkan untuk tercapainya suatu tujuan

4. Proses pengawasan

Proses pengawasan merupakan bagian dari manajemen untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana tujuan awal (Kencana syafie : 2010).

1.6.2 Indikator pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui pencapaian daripada tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat berdaya atau tidak. Melalui cara ini kita bisa melihat program pemberdayaan yang diberikan dan dapat difokuskan pada aspek apa saja dari perubahannya.

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut Suharto : 2005 indikator yang dapat dikaitkan dalam proses keberhasilan pemberdayaan yaitu:

1. Keberhasilan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah . seperti ke pasar, fasilitas kesehatan, sekolah, dll

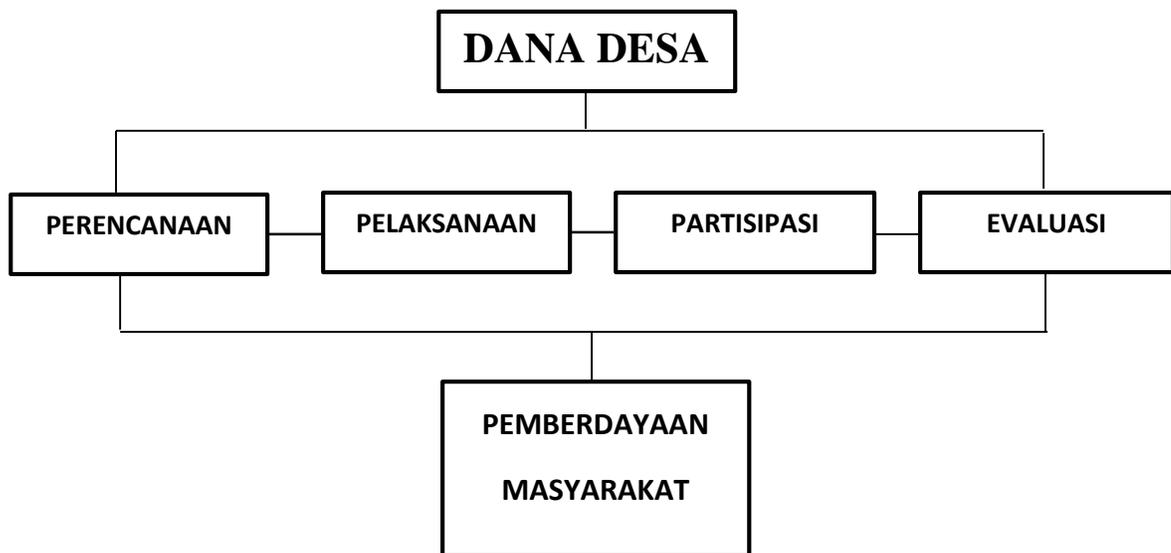
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan sehari hari, seperti: beras, minyak goreng, bumbu dapur, sabun, shampo, dll
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli bahan pendamping atau tersier, seperti: TV, pakaian, perabotan rumah tangga, dll
4. Jaminan ekonomi dan kontribusi keluarga, seseorang dianggap berdaya jika memiliki rumah, aset, tabungan dan itu milik sendiri, bukan milik keluarga.

1.6.3 Aspek Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soemodiningrat 2002, upaya memberdayakan masyarakat bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan situasi dimana untuk memungkinkan masyarakat bisa berkembang. Disini poinnya adalah pengenalan bahwa pada dasarnya setiap manusia bisa dikembangkan.
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi seseorang untuk berdaya. Untuk mengaktualisasikan langkah ini diperlukan langkah positif dan nyata.
3. *Opportunities*, yaitu pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat individu menjadi berdaya.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam penelitian mengenai Analisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan, maka dapat digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai berikut:



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan, menerangkan, menceritakan secara rinci tentang permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin mengenai individu, kelompok atau suatu kejadian tertentu

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dimana Desa tersebut menjadi salah satu dari banyaknya Desa di Indonesia yang menerima Dana Desa.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan dari berbagai informan, diantaranya: Kepala Desa Gotputuk, Perangkat Desa Gotputuk, BPD Gotputuk, dan warga Desa Gotputuk

1.7.4 Jenis Data

Data dan informasi mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Gotputuk didasarkan pada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari kepala desa, badan perwakilan desa dan masyarakat desa.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung ke lokasi desa yang menjadi objek penelitian.
2. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan masyarakat desa
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, Lpj/catatan, arsip yang berkaitan dengan Dana Desa
4. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.6 Kualitas Data

Teknik untuk menguji kebenaran data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk kepentingan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh informan.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data penelitian merupakan proses mengidentifikasi data yang telah diolah. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik Analisis Domain. Dalam analisis data ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.